

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Grafik	xiii
Daftar Gambar	xv
Abstract	xvi
Intisari	xviii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	22
Bab II LANDASAN TEORI	24
A. Desentralisasi	24
B. Desentralisasi Fiskal	30
C. Pajak Daerah	33
D. Administrasi Perpajakan Daerah	38
E. Tesis Bias Perkotaan	47
F. Kerangka Pemikiran	50
Bab III METODE PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian	53
B. Definisi Konseptual	54
C. Definisi Operasional	54
D. Fokus dan Lokus Penelitian	55



E.	Tahapan Penelitian	57
F.	Pengumpulan dan Analisis Data	58

BAB IV KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL OLEH PEMERINTAH PUSAT	71	
A.	Desentralisasi Fiskal	72
B.	Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	81

BAB V SISTEM PERPAJAKAN DAERAH UNTUK DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA SETELAH REFORMASI PERPAJAKAN DAERAH	101	
A.	Kebijakan Periode 1997 – 2000 : Sistem Daftar Tertutup	102
B.	Kebijakan Periode 2000 – 2009 : Sistem Daftar Terbuka	115
C.	Kebijakan Periode 2009 – : Sistem Daftar Tertutup	123

BAB VI RESPON DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PUSAT	143	
A.	Implementasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Closed List System</i> di Daerah Kota Yogyakarta	144
1.	Kebijakan Periode 1997 – 2000 : Sistem Daftar Tertutup	145
2.	Kebijakan Periode 2000 – 2009 : Sistem Daftar Terbuka	156
3.	Kebijakan Periode 2000 – 2015 : Sistem Daftar Tertutup	162
B.	Implementasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Closed List System</i> di Daerah Kabupaten Sleman	180
1.	Kebijakan Periode 1997 – 2000 : Sistem Daftar Tertutup	180
2.	Kebijakan Periode 2000 – 2009 : Sistem Daftar Terbuka	189
3.	Kebijakan Periode 2000 – 2015 : Sistem Daftar Tertutup	193
C.	Implementasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Closed List System</i> di Daerah Kabupaten Bantul	212
1.	Kebijakan Periode 1997 – 2000 : Sistem Daftar Tertutup	212
2.	Kebijakan Periode 2000 – 2009 : Sistem Daftar Terbuka	220
3.	Kebijakan Periode 2000 – 2015 : Sistem Daftar Tertutup	226



D.	Implementasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Closed List System</i> di Daerah Kabupaten Kulon Progo	243
1.	Kebijakan Periode 1997 – 2000 : Sistem Daftar Tertutup	243
2.	Kebijakan Periode 2000 – 2009 : Sistem Daftar Terbuka	252
3.	Kebijakan Periode 2000 – 2015 : Sistem Daftar Tertutup	258
E.	Implementasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Closed List System</i> di Daerah Kabupaten Gunungkidul	275
1.	Kebijakan Periode 1997 – 2000 : Sistem Daftar Tertutup	276
2.	Kebijakan Periode 2000 – 2009 : Sistem Daftar Terbuka	283
3.	Kebijakan Periode 2000 – 2015 : Sistem Daftar Tertutup	287
F.	Implikasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Closed List System</i> terhadap Penerimaan Daerah Kota dan Daerah Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta	304
1.	Implikasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Close List System</i> terhadap Penerimaan Daerah di Kota Yogyakarta	304
2.	Implikasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Close List System</i> terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Sleman	307
3.	Implikasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Close List System</i> terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Bantul	310
4.	Implikasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Close List System</i> terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	313
5.	Implikasi Kebijakan <i>Open List System</i> dan <i>Close List System</i> terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Gunungkidul	317
6.	Kesimpulan	319
BAB VII EFEKTIVITAS REFORMASI PERPAJAKAN DAERAH		324
A.	Mengatasi Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah	324
B.	Potensi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota	332
C.	Kebijakan Sistem Daftar Terbuka dan Daftar Tertutup	344
D.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah pada Sistem Daftar Tertutup dan Sistem Daftar Terbuka	365
BAB VIII PENUTUP		374
A.	Kesimpulan	374
B.	Saran	376
Daftar Pustaka		379

Daftar Tabel

Tabel 1. 1.	Persentase Kontribusi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2010 – 2015	2
Tabel 1. 2.	Persentase Kontribusi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2010 – 2015	4
Tabel 1. 3.	Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Mengenai Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8
Tabel 1. 4.	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9
Tabel 1. 5.	Perbandingan Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1987/1988 – 2015	18
Tabel 2. 1.	Dekonsentrasi versus Desentralisasi	28
Tabel 2. 2.	<i>Open List System</i> versus <i>Close List System</i>	39
Tabel 3. 1.	Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Desentralisasi Fiskal	60
Tabel 3. 2.	Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Desentralisasi Perpajakan Daerah	61
Tabel 3. 3.	Peraturan Daerah yang Terkait dengan Pemungutan Pajak Daerah di Daerah Kabupaten dan Daerah kota se Daerah Istimewa Yogyakarta	62
Tabel 3. 4.	Narasumber Penelitian	64
Tabel 3. 5.	Informan Pemerintah Pusat	65
Tabel 3. 6.	Informan Pemerintah Daerah	67
Tabel 4. 1.	Konsep <i>Earmarking</i> dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80
Tabel 5. 1.	<i>Evaluation of Principal Local Taxation</i>	103
Tabel 7. 1.	Perbandingan Jenis-jenis Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 1997/1998 – 2015	345
Tabel 7. 2.	Sebaran Penerimaan Pajak Daerah untuk Daerah Kabupaten dan Daerah Kota se Indonesia 1997/1998 – 2015	362
Tabel 7. 3.	Analisis Varian (ANOVA) terhadap Rata-rata Penerimaan Pajak Daerah pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota se-Indonesia 1997/1998 – 2015	363

Daftar Grafik

Grafik 1. 1.	Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2003 – 2015	3
Grafik 1. 2.	Perbandingan Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Daerah pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1997/1998 – 2015	17
Grafik 1. 3.	Perbandingan Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Daerah Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1987/1988 – 2015	19
Grafik 6. 1.	Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 1998/1999 – 2015	175
Grafik 6. 2.	Kontribusi Jenis-jenis Pajak Daerah terhadap Perolehan Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 1998/1999 – 2015 .	177
Grafik 6. 3.	Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sleman 1998/1999 – 2015	206
Grafik 6. 4.	Kontribusi Jenis-jenis Pajak Daerah terhadap Perolehan Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sleman 1998/1999 – 2015	208
Grafik 6. 5.	Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bantul 1998/1999 – 2015	238
Grafik 6. 6.	Kontribusi Jenis-jenis Pajak Daerah terhadap Perolehan Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bantul 1998/1999 – 2015	240
Grafik 6. 7.	Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 1998/1999 – 2015	270
Grafik 6. 8.	Kontribusi Jenis-jenis Pajak Daerah terhadap Perolehan Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 1998/1999 – 2015	272
Grafik 6. 9.	Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 1998/1999 – 2015	299
Grafik 6. 10.	Kontribusi Jenis-jenis Pajak Daerah terhadap Perolehan Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 1998/1999 – 2015	301
Grafik 6. 11.	Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dari Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 1997/1998 – 2015	320
Grafik 7. 1.	Jumlah Perolehan Pendapatan Asli Daerah untuk Seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota se-Indonesia 1997/1998 – 2015	325



Grafik 7. 2.	Rata-rata Jumlah Perolehan Pendapatan Asli Daerah per Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di Indonesia 1997/1998 – 2015	326
Grafik 7. 3.	Besaran Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Pendapatan Komponen Lainnya pada Perolehan PAD Daerah Kabupaten dan Daerah Kota se-Indonesia 1997/1998 – 2015	327
Grafik 7. 4.	Prosentase Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Pendapatan Komponen Lainnya pada Perolehan PAD Daerah Kabupaten dan Daerah Kota se-Indonesia 1997/1998 – 2015	330
Grafik 7. 5.	Perolehan PDRB Daerah Kabupaten dan Daerah Kota se Indonesia 1998 – 2015	333
Grafik 7. 6.	Rata-rata Perolehan PDRB Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di indonesia 1998 – 2015	334
Grafik 7. 7.	Besaran PDRB yang dapat Dikenakan Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota se- Indonesia 1998 – 2015	336
Grafik 7. 8.	Perolehan Pajak Daerah pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota se Indonesia 1997/1998 – 2015	347
Grafik 7. 9.	Rata-rata Perolehan Pajak Daerah pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di Indonesia 1997/1998 – 2015	349



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PERPAJAKAN DI INDONESIA (STUDI TERHADAP
OPEN LIST SYSTEM DAN
CLOSE LIST SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

ACHMAD LUTFI, S.SOS., M.SI., Prof. Dr. Pratikno, M. Soc. Sc; Prof. Dr. Warsito Utomo, Prof. Dr. Wahyudi Kumoro

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Daftar Gambar

Gambar 2. 1.	Skema Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	37
Gambar 2. 2.	Skema Kerangka Pemikiran	51